



Jurnal Bakaba
Volume 6, Nomor 2, Desember, 2017

REVITALISASI KAWASAN KOTA TUA PADANG SEBAGAI SALAH SATU ALTERNATIF
WISATA SEJARAH DI KOTA PADANG

Penulis : Refni Yulia, SS, M.Hum, Meri Erawati, SS, M.Hum, Prof, Dr. Phil Gusti Asnan,
Dr. Noriyasman, M.Hum
Sumber : Jurnal Bakaba, Volume 6, Nomor 2, Juni - Desember 2017
Diterbitkan Oleh : Laboratorium Program Studi Pendidikan Sejarah Sekolah Tinggi Keguruan
dan Ilmu Pendidikan (STKIP) PGRI Padang

Untuk Mengutip Artikel ini :

Refni Yulia, Meri Erawati, Gusti Asnan, Noriyasman, 2017. Revitalisasi Kawasan Kota
Tua Padang Sebagai Salah Satu Alternatif Wisata Sejarah Di Kota Padang, Jurnal
Bakaba, Volume 6, Nomor 2, Desember, 2017 : 17-23

Copyright © 2017, Jurnal Bakaba
ISSN : 2597-9450 (Online)

Laboratorium Prodi Pendidikan Sejarah
STKIP PGRI Sumatera Barat



REVITALISASI KAWASAN KOTA TUA PADANG SEBAGAI SALAH SATU ALTERNATIF WISATA SEJARAH DI KOTA PADANG

Refni Yulia, SS, M.Hum¹, Meri Erawati, SS,² M.Hum, Prof. Phil. Gusti Asnan,³ DR. Nopriyasman, M.Hum⁴

¹Dosen Prodi Pendidikan Sejarah STKIP PGRI Sumatera Barat (Cambria 11)

Email : refniyulia17@gmail.com (Cambria 10)

²Dosen Prodi Pendidikan Sejarah STKIP PGRI Sumatera Barat

³Guru Besar Ilmu Sejarah Universitas Andalas

⁴Dosen Jurusan Ilmu Sejarah Universitas Andalas

ABSTRAK

Peninggalan sejarah mendatangkan keuntungan besar dalam bidang pariwisata sejarah dan budaya. Padang sebagai kota warisan Kolonial Belanda juga memiliki bangunan bersejarah yang sudah dikategorikan sebagai benda cagar budaya. Berdasarkan Keputusan Walikota Padang nomor 3 tahun 1998 terdapat sebanyak 74 buah bangunan yang masuk kategori benda cagar budaya. Dewasa ini jumlah bangunan bersejarah yang masih bertahan semakin berkurang, seiring dengan kurangnya kontrol pemerintah dan juga terjadinya bencana alam. Untuk itu diperlukan keseriusan dan kesadaran sejarah dari semua pihak (stakeholder), baik itu pemerintah maupun jajaran industri pariwisata, termasuk masyarakat kota Padang untuk mengembangkan dan melestarikan pariwisata kota tua Padang. Karena potensi wisata yang ada di kota tua Padang sangat beragam dan menjual untuk wisata budaya, agama dan sejarah. Kota tua yang multi etnis dan beragam budaya yang juga eksis menjadi bagian kecil dari potensi wisata yang dapat dijual kepada wisatawan lokal, nasional maupun internasional. Semua itu hanya diperlukan kerjasama yang baik antar semua elemen masyarakat untuk saling menjaga dan melestarikan serta mengembangkan potensi kota tua yang ada. Jika hal itu terwujud pariwisata kota tua Padang akan memberikan kontribusi yang besar bagi pemerintah kota Padang melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD), perbaikan ekonomi bagi masyarakat setempat dan juga bisa menjadi alternatif wisata yang berbudaya, religi dan sejarah bagi Kota Padang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif.

Kata Kunci : kota tua, padang, pariwisata, budaya, kebijakan

¹ Penulis adalah Staf pengajar di Program Studi Pendidikan Sejarah STKIP PGRI Sumatera Barat

² Penulis adalah Staf pengajar di Program Studi Pendidikan Sejarah STKIP PGRI Sumatera Barat

³ Penulis adalah staf pengajar di Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu-Ilmu Budaya Universitas Andalas

⁴ Penulis adalah staf pengajar di Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu-Ilmu Budaya Universitas Andalas

PENDAHULUAN

Dewasa ini pengembangan pariwisata kota tua menjadi tren dalam pengembangan pariwisata di Indonesia. Hal ini terlihat dari suksesnya pengembangan pariwisata kota tua Jakarta, Semarang, Surabaya dan juga Sawahlunto. Khusus untuk Sawahlunto yang mengusung pariwisata kota tambang yang berbudaya dinilai berhasil karena terdaftar dalam *heritage* Unesco. Dimana setiap tahunnya mampu menarik wisatawan lokal, nasional dan internasional untuk datang ke Sawahlunto.

Kota Padang yang merupakan salah satu kota warisan Kolonial Belanda juga mempunyai potensi wisata yang jika dikembangkan dengan baik akan menjadi ikon wisata baru yang berbudaya dan bernilai sejarah. Sebagai kota bekas peninggalan kolonial Belanda, Padang memiliki banyak bangunan-bangunan tua bersejarah yang perlu dilestarikan dan dijaga keberadaannya. Sebagian besar kondisi bangunan tua bersejarah tersebut sekarang ini kondisinya rusak, hancur dan bahkan ada yang sudah berganti menjadi bangunan baru. Jika kondisi tersebut terus dibiarkan, maka semua bangunan yang bersejarah tersebut akan hancur dan kehilangan ciri khasnya. Padahal jika bangunan tersebut dipugar dan direvitalisasi sesuai dengan bentuk aslinya akan bisa menjadi asset wisata yang baik bagi Kota Padang.

Membangun dan mengembangkan wisata yang berlandaskan pada historis kota peninggalan Kolonial Belanda di Kota Padang bukanlah perkara yang mudah dan murah. Banyak persiapan dan persoalan yang perlu dipikirkan solusinya oleh pemerintah Kota Padang sebagai pihak yang bertanggung jawab. Karena membangun pariwisata disebuah kota dibutuhkan kontribusi dan keterlibatan seluruh elemen yang ada seperti pemerintah, masyarakat dan juga investor. Tiga elemen ini menjadi titik tolak penentu keberhasilan pembangunan pariwisata di sebuah kota. Pemerintah sebagai pemangku kebijakan harus bisa merangkul masyarakat sebagai pemilik bangunan dan bekerjasama dengan investor untuk mewujudkan pariwisata kota tua yang berbasis wisata budaya dan sejarah. Karena kerusakan dan keberlangsungan revitalisasi kota tua Padang

harus segera dilaksanakan supaya bangunan tua tersebut terus lestari dan menjadi daya tarik wisata untuk generasi yang akan datang. Berdasarkan permasalahan tersebut maka dirumuskan penelitian pada beberapa hal yaitu : Bagaimana kebijakan pemerintah Kota Padang dalam menata kota tua Padang sebagai wisata alternatif?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini memakai metode penelitian Kualitatif. Penelitian kualitatif mencoba mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai kompleksitas yang ada dalam interaksi manusia (Catherine Marshal, 1994). Sedangkan menurut Poerwandari penelitian kualitatif menghasilkan dan mengolah data yang bersifat deskriptif, seperti transkrip wawancara, catatan lapangan, gambar, foto, rekaman, video dan lain sebagainya. Dalam pengumpulan data digunakan beberapa teknik yang tepat supaya diperoleh data yang valid dan realibel.

Data yang dipakai adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari lapangan seperti informasi yang dihimpun dari tempat penelitian. Data sekunder didapatkan dari tangan kedua atau dari sumber bacaan seperti Koran atau surat kabar, majalah dan arsip-arsip pemerintah. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui cara, wawancara dengan beberapa stakeholder terkait, pengamatan dan observasi dan juga dokumentasi data-data tertulis yang terkait dengan penelitian seperti RPJP, RPJM, Renstra, Laporan Dinas Pariwisata kota Padang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rencana revitalisasi kawasan kota tua Padang sudah dimulai dari masa walikota Zuyen Rais tahun 1998. Hal ini didasarkan kepada undang-undang nomor 5 tahun 1992 tentang benda cagar budaya. Benda cagar budaya adalah benda alam atau benda buatan manusia baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan sejarah perkembangan manusia (UU No.5 tahun 1992). Zuyen Rais kemudian mengeluarkan Surat Keputusan Walikota

Nomor 3 tahun 1998 tentang perlindungan cagar budaya. Keputusan ini diwujudkan dengan menetapkan 74 bangunan tua di Kota Padang yang termasuk dalam bangunan cagar budaya berdasarkan SK Walikota Padang Nomor 03 Tahun 1998.

Revitalisasi kemudian dilanjutkan dimasa walikota Padang Fauzi Bahar (2004-2014). Namun upaya revitalisasi kota tua tidak berjalan dengan lancar karena terjadi gempa bumi tahun 2009. Gempa bumi 30 September 2009 ini menyebabkan proses revitalisasi terhambat karena pemerintah sibuk mengurus proses rehabilitasi pasca gempa. Hal ini juga menyebabkan sebagian besar bangunan sejarah yang termasuk kategori benda cagar budaya mengalami kerusakan parah, rusak ringan dan juga ada yang hancur. Hal ini membuat pemerhati budaya merasa risau dan perlu segera menyelamatkan bangunan tua yang termasuk kategori benda budaya.

Berdasarkan RTRW Kota Padang Tahun 2010-2030, kawasan Kota Tua ditetapkan sebagai lingkungan cagar budaya yang berfungsi untuk pariwisata. Namun demikian, belum ada tanda-tanda berkembangnya kegiatan ekonomi berbasis pariwisata di kawasan tersebut. Keunikan dan kekhasan bangunan di kawasan kota tua memang menarik wisatawan untuk berkunjung dan melihat-lihat, tetapi hal ini belum dimanfaatkan secara maksimal oleh pemerintah Kota Padang. Belum ada upaya yang dilakukan untuk mengelola potensi pariwisata yang dapat memperkuat daya tarik wisata kawasan kota tua. Pemerintah daerah Kota Padang sebagai pemangku kebijakan utama dan tua rumah di kawasan kota tua harus melihat dan menyelesaikan berbagai polemik dan kepentingan di kawasan tersebut. Ada banyak kepentingan yang menjadi pekerjaan rumah (PR) besar bagi pemerintah Kota Padang untuk pembenahan kawasan ini kedepannya supaya bernilai jual wisata yang tinggi. Kepentingan tersebut adalah konservasi bangunan bersejarah, perlindungan kebencanaan, dan peluang pariwisata bagi seluruh elemen masyarakat, yang harus segera disusun dan diregenerasikan demi pembaharuan dan optimalisasi potensi kawasan kota tua.

Pemilihan strategi regenerasi kawasan yang sesuai dengan keragaman budaya dan tren pasar wisata (*cultural*

tourism) harus menjadi patokan utama pemerintah sebelum membenahi kawasan potensial ini. Tren pasar wisata (*cultural tourism*) kemudian berubah menjadi wisata kreatif (*creative tourism*), sehingga pilihan strategi yang dianggap sesuai adalah *cultural quarter*. Adapun *cultural quarter* adalah strategi pencitraan kembali (*re-imagining*) sebuah kota dengan mengutamakan pelestarian budaya lokal dan kreativitas komunitas. *Cultural quarter* memandang bahwa budaya lokal merupakan modal bagi perekonomian yang besar sehingga perlu dilakukan komodifikasi.

Hal ini yang kemudian dikenal sebagai konsep *creative city*. Urgensi konsep ini di Indonesia diperlihatkan dengan ditetapkannya Tahun Ekonomi Kreatif Departemen Perdagangan dan Perindustrian pada 2009. Dalam konteks kawasan perencanaan, konsep kota kreatif kemudian diturunkan dalam skala kawasan dan diadaptasi untuk kepentingan pariwisata, dikenal dengan konsep wisata kreatif / *creative tourism*.

Dengan demikian, hal ini melatar belakangi dilakukan upaya regenerasi Kota Tua untuk tujuan wisata menggunakan konsep kawasan kreatif. Upaya ini dilakukan untuk menata, memvitalkan kembali, dan mendorong pemanfaatan potensi kawasan Kota Tua Padang.

1. Gambaran Kota Padang Masa Kolonial Belanda

Kota Padang sebagai kota pantai dan juga kota pelabuhan pada masa Kolonial Belanda berfungsi sebagai kota pemerintahan yang strategis oleh Pemerintah Kolonial Belanda untuk menguasai daerah pedalaman Minangkabau (*hinterland*) yang kaya akan hasil bumi. Kehadiran VOC di Kota Padang tidak lepas dari Perjanjian Painan (*Het Painansch Traktaat*) tahun 1663, dimana orang Minangkabau meminta bantuan Belanda untuk mengusir orang Aceh dari Padang. Sebagai hadiahnya Belanda boleh mendirikan loji di Pulau Cingkuk. Setahun kemudian loji tersebut dipindahkan ke Padang. Loji berfungsi sebagai tempat tinggal, kantor atau sebagai gudang atau sebagai benteng tempat melakukan perdagangan dan administrasi pemerintahan dan pusat pertahanan VOC. Dengan begitu Belanda

menjadikan Padang sebagai tempat pemukiman, perdagangan dan juga tentara.

Pemerintah Kolonial Belanda menjadikan wilayah sepanjang aliran sungai Batang Arau atau yang dikenal dengan daerah Muaro Padang sebagai wilayah pemukiman, perdagangan dan juga pertahanan militer. Oleh karena itu di wilayah ini banyak bangunan peninggalan Kolonial Belanda yang sampai hari ini masih berdiri dengan kokoh walaupun kondisinya banyak yang memprihatinkan. Wilayah ini sekarang dikenal dengan kawasan kota tua Padang. Kawasan ini juga merupakan cikal bakal terbentuknya Kota Padang hari ini.

2. Kota Padang dalam konteks kekinian: Arah Kebijakan

Wilayah kota lama masa Kolonial di Kota Padang hari ini dikenal dengan kawasan Muaro Batang Arau, Pasar Gadang, Pasar Batipuh, Pasar Mudik, Palinggam, Pondok, Kampung Jawa, dan daerah pinggir laut. Daerah-daerah tersebut secara administrasi sekarang ini masuk dalam Kecamatan Padang Barat dan Padang Selatan. Kawasan Pondok dikenal sebagai wilayah “Pecinan Padang” tempat etnis Tionghoa bermukim dan berbisnis baik itu elektronik maupun kuliner.

Proses revitalisasi kawasan kota tua Padang sudah di mulai sejak lama yaitu sejak masa pemerintahan Walikota Zuyen Rais. Hal ini terlihat dengan keluarnya Surat Keputusan Walikota nomor 3 tahun 1998 tentang pendataan bangunan kuno dan Kolonial serta bersejarah di Kotamadya Padang. Berdasarkan keputusan ini akhirnya ditetapkan sebanyak 74 buah bangunan tua dan bersejarah sebagai bangunan cagar budaya.

Menurut Undang-Undang pemerintah nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan dinyatakan bahwa wisata adalah perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Wisata itu banyak sekali jenisnya, dapat dilihat pada gambar berikut:



Berdasarkan definisi yang terdapat dalam Undang-Undang pemerintah nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan disebutkan bahwa wisata sejarah adalah wisata yang dilakukan ke tempat-tempat yang memiliki nilai sejarah. Berangkat dari definisi tersebut, maka wisata ke kawasan kota tua dapat dikategorikan sebagai kawasan wisata sejarah.

Berbagai usaha dan kebijakan telah dilakukan oleh pemerintah Kota Padang sejak masa keluarnya Surat Keputusan Walikota Padang Zuyen Rais pada tahun 1998 hingga masa kepemimpinan Walikota saat ini Mahyeldi Ansharullah. Adapun program dan kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah Kota Padang sejak tahun 1998-2015 dapat dilihat pada kerangka berikut:



Kebijakan pemerintah pada masa kepemimpinan Walikota Padang Fauzi Bahar, berencana untuk menetapkan kawasan kota tua sebagai bagian dari kawasan wisata terpadu yang mana include dengan wisata pantai Padang yang dikategorikan sebagai

wisata bahari. Adapun program Kawasan Wisata Terpadu telah dirancang pada masa pemerintahan Walikota Padang Fauzi Bahar pada tahun 2006. Meskipun telah dicanangkan untuk penataan kota tua Padang sejak tahun 2004, namun hingga kini rencana untuk mengembangkan kawasan kota tua sebagai kawasan wisata belum juga terwujud, baik sebagai wisata sejarah maupun sebagai bagian dari wisata terpadu. Pemerintah sebetulnya telah punya program, akan tetapi semua program dan kebijakan yang telah dicanangkan tidak berjalan sebagaimana mestinya, sementara itu masyarakat sebagai pemilik bangunan juga memiliki asumsi sendiri terhadap pemerintah yang dinilai tidak serius dalam penataan kota, pemerintah juga beralasan memiliki keterbatasan anggaran mewujudkan program-program yang dicanangkan, sehingga terlihat upaya untuk menjadikan kawasan kota tua ini sebagai wisata akan sulit terwujud karena tidak adanya koordinasi antara pemerintah dan masyarakat. Sejatinya pemerintah dapat mencontoh kepada program yang telah dibuat dan berhasil dilaksanakan oleh pemerintah kota Sawahlunto dalam menjadikan kota tua mereka sebagai tujuan wisata dengan melibatkan pihak luar yaitu investor. Jika koordinasi antara ketiga pihak ini berjalan dengan bagus, maka tidak tertutup kemungkinan program ini akan berhasil.

Pada masa kepemimpinan Fauzi Bahar revitalisasi kota tua Padang kembali didegaungkan dengan konsep wisata terpadu dan pembentukan wisata pantai yang dikenal dengan Pelabuhan Marina Padang. Hanya saja upaya ini tidak jadi terwujud karena peristiwa gempa bumi 30 September 2009 merubah wacana wisata dan juga revitalisasi bangunan tua di Kota Padang. Padang mengalami dampak luar biasa dari bencana gempa, dimana kerugian tidak hanya pada bangunan tetapi juga pada manusianya. Dari 74 buah bangunan yang ditetapkan sebagai benda cagar budaya, sebanyak 46 buah bangunan mengalami rusak parah, ringan dan hancur. Rusaknya bangunan juga disebabkan oleh kondisi bangunan yang sudah tua dan tidak terawat.

Pemugaran dan pendataan bangunan tua yang rusak akibat gempa bumi kemudian dilakukan oleh berbagai pihak baik itu

pemerintah, swasta, perguruan tinggi dan juga LSM. Pemerintah Kota Padang memanfaatkan momen gempa bumi sebagai upaya untuk mewujudkan kota tua sebagai kawasan wisata bersejarah dengan melibatkan semua *stakeholder* terkait seperti pemerintah, swasta, akademisi, pemerhati budaya dan masyarakat dalam berbagai kegiatan seminar dan workshop tentang wisata kota tua Padang baik dalam skala lokal, nasional dan internasional.

Upaya revitalisasi kawasan kota tua juga menjadi agenda pengembangan wisata utama oleh walikota Mahyeldi Ansarullah. Upaya yang dilakukan Mahyeldi adalah dengan membentuk sayembara pengembangan wisata kota tua dengan melibatkan Ikatan Arsitek Indonesia (IAI). Dari sayembara ini kemudian didapatkan pemenangnya dengan terpilihnya model penataan yang sesuai dengan keinginan Pemerintah Kota Padang yang akan menjadikan Kawasan Kota Tua Padang dalam sebuah konsep Kawasan wisata Terpadu (KWT). KWT ini meliputi lima kawasan strategis yaitu Pantai Padang, Kawasan Kota Lama Batang Arau, Kawasan Jembatan Siti Nurbaya, Kawasan Gunung Padang dan Kawasan Air Manis Padang.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian dilapangan didapatkan bahwa tidak jalannya kebijakan pemerintah tentang revitalisasi Kota Tua Padang disebabkan oleh persoalan klasik yang sampai sekarang belum bisa diselesaikan. Masalah tersebut diantaranya berkaitan dengan status kepemilikan bangunan bersejarah yang sebagian besar milik swasta (perorangan), kurangnya sosialisasi pemerintah kepada masyarakat sebagai pemilik bangunan tua dan kekurangan dana (investor).

Pada intinya kebijakan revitalisasi kota tua Padang yang digabungkan sejak masa pemerintahan Zuyen Rais, Fauzi Bahar dan Mahyeldi Ansarullah baru hanya sebatas rencana belum ada aplikasinya atau penerapannya dengan berbagai alasan yang terkadang klise. Walaupun belakangan ini pemerintah Kota Padang mulai melakukan penataan wilayah dengan konsep pedestrian kota di kawasan Muaro Batang Arau Padang. Hanya saja konsep ini belum diiringi dengan berbagai fasilitas penunjang

yang akan membuat pengunjung nyaman dan merasakan sebuah kawasan sejarah yang penuh cerita, nostalgia dan juga perjuangan bangsa.

Revitalisasi kawasan kota tua Padang, sudah mendesak untuk dilaksanakan karena kalau terus diulur-ulur akan menyebabkan bangunan hancur dan juga kepunahan budaya. Dewasa ini pemerintah kota Padang melalui dinas Pariwisata Kota Padang melakukan terobosan baru dengan memperbanyak event pariwisata yang bertujuan untuk mengangkat wisata kota tua. Pelaksanaan festival Siti Nurbaya yang dilakukan setiap tahun seharusnya dilakukan secara bersamaan dengan agenda wisata kota tua seperti Imlek, dan serak gulo. Dinas pariwisata kota Padang kemudian menjadikan semua tradisi itu dalam kalender wisata kota Padang yang bekerjasama dengan biro perjalanan dan juga mengandeng masyarakat sekitar kota tua sebagai pemilik kebudayaan.

Peraturan Menteri Kebudayaan dan pariwisata Tahun 2010

Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang tahun 2014-2019

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014-2019

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Pelindungan Bangunan Cagar Budaya Nomor 11 tahun 2010.

Undang-Undang Benda Cagar Budaya Nomor 5 Tahun 1992

Wahyu Prakarsa, "Kota Tua Jakarta: Revitalisasi Menyeluruh Atau Menghilang?" *Proceeding PESAT (Psikologi, Ekonomi, Sastra, Arsitektur dan Sipil)*, Vol 4 Oktober 2011

Refni Yulia dkk, "Analaisis Kebijakan Pengelolaan Kota Tua Berbasis Wisata Sejarah", *Laporan Penelitian*. STKIP PGRI Sumatera Barat dan Universitas Andalas, 2015

Erniwati, *Asap Hio Di Ranah Minang: Komunitas Tionghoa Di Sumatera Barat* (Yogyakarta: Ombak, 2007

Freek Colombijn, *Paco-Paco Kota Padang* (Yogyakarta: Ombak, 2006)

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang